

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Collaborative governance adalah tata kelola pemerintahan yang mana secara langsung melibatkan pemangku kepentingan dari eksternal untuk menetapkan kebijakan dan program publik. Fokusnya adalah untuk mencapai konsensus dan terlibat dalam diskusi selama proses pengambilan keputusan kolektif. (Ansell dan Gash dalam Astuti,dkk 2008:41).

Collaborative Governance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rencana kerja yang mengawasi satu atau lebih entitas publik yang secara langsung terhubung dengan pemangku non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif formal dengan tujuan mencapai konsensus dan musyawarah mengenai pengembangan atau pelaksanaan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. (Ansel dan Gash dalam Astuti, dkk 2008:42).

Tujuan kerja sama pemerintahan adalah memecahkan masalah tertentu dari semua pihak yang terkait, tidak terbatas pada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan terdapat berbagai elemen untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses (Ansell & Gash dalam Muhammad Noor, dkk 2007:2).

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kategori usaha yang sering dijalankan oleh pelaku bisnis. Namun, UMKM menghadapi tantangan untuk bertahan dalam persaingan digitalisasi bisnis. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan digitalisasi UMKM di Indonesia. Banyak pemerintah

menekankan pentingnya UMKM dan teknologi dalam operasional bisnis. UMKM menjadi peran penting dalam ekonomi global, seperti berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, inovasi, dan produk domestik bruto. UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko kegagalan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu cara pengembangan produk dan cara penerapan strategi pemasaran yang efisien. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berusaha membantu serta mengembangkan bisnis untuk menciptakan perekonomian itu didasarkan pada demokrasi ekonomi yang adil. Berkat perkembangan teknologi digital dan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, UMKM memiliki peluang untuk membangun pasar yang lebih luas dan adil. (Maheswari Dalam Sarjana, dkk 2022:2-3).

Peningkatan jumlah pengusaha UMKM di Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa UMKM telah mencapai banyak keberhasilan. Ini adalah hal yang baik karena masyarakat Aceh telah berusaha untuk mendapatkan pendapatan utama atau tambahan agar mereka dapat menjadi mandiri. Dengan sendirinya, ini memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekonomi lokal, yang berdampak positif pada masyarakat setempat. Laporan Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh saat ini sejumlah 74.810 UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan UKM, sedang memfokuskan pada adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan informasi digital, termasuk internet, untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis, seperti jaringan pemasaran, mitra kerja, permodalan, dan

inovasi produk. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman tentang manfaat penggunaan teknologi dalam pengembangan bisnis dari teknologi informasi berbasis internet.

Sebagian besar UMKM di kota Lhokseumawe belum memanfaatkan kesempatan ini karena banyak hambatan. termasuk kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital, kurangnya keahlian dalam pemasaran digital, dan kurangnya pengetahuan tentang potensi pemasaran digital. Selain itu, diharapkan bahwa melalui pendidikan dan bantuan, pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, BUMN, dan sektor swasta akan lebih berperan dalam mengembangkan UMKM di pasar digital. Digitalisasi membuka banyak peluang kerja baru, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya usaha kecil dan menengah di kota Lhokseumawe yang beralih ke platform digital dan menjual produk mereka melalui media sosial. (<https://news.unimal.ac.id> diakses 4 sep 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku UMKM Kuliner di Kota Lhokseumawe

Jumlah Pelaku UMKM Kuliner Kota Lhokseumawe		
Tahun	2019	2.061
	2020	2.191
	2021	2.307
	2022	2.490
	2023	2.813

Sumber: (Dinas Pendistribusian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe)

Collaborative governance dalam konteks ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi UMKM Kota Lhokseumawe, Asosiasi Pengusaha UMKM Kota Lhokseumawe, Pelaku UMKM pada usaha kuliner di Kota Lhokseumawe dan beberapa perusahaan atau organisasi lain. Kerja sama pemerintah Kota Lhokseumawe dan pihak lainnya

merupakan upaya untuk memperkecil ketimpangan transformasi digital dan produktivitas ekonomi terutama di wilayah daerah.

Kepala Seksi Bidang Usaha Kecil dan Menengah di Kota Lhokseumawe, Jafruddin, menyebutkan masih banyak lagi para UMKM kurang dalam memanfaatkan digital untuk pemasaran, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, Jafruddin membahas sejumlah kendala internal dan eksternal yang menghambat pertumbuhan UMKM di Aceh dan kota Lhokseumawe, termasuk kesulitan untuk mendapatkan mengakses perbankan. Selain itu, pemerintah kota Lhokseumawe telah meluncurkan program pendampingan yang disebut Lhokseumawe UMKM Center. Pusat ini akan berfungsi sebagai pusat komunikasi dan dukungan untuk kegiatan UMKM dan akan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk UMKM. Selain itu, pusat ini akan memiliki koneksi digital ke aplikasi SIPINTER, yang akan memudahkan akses informasi tentang UMKM di wilayah tersebut. *(wawancara pada Rabu, 25 September 2024).*

Tabel 1.1 Kuliner dikota Lhokseumawe

No	Jenis Kuliner	
	Kuliner Besar	Kuliner Ringan
1	Mie Aceh	Kue Bhoi
2	Sate Matang	Kue Keukarah
3	Kerang Sambal Nanas	Pisang Sale
4	Ikan Keumamah	Kue Timphan
5	Sambai Oen Peugaga	Kue Meusekat
6	Kuah Pliek U	Rujak Aceh
7	Kari Kambing & Roti Cane	Manisan Buah Pala

Sumber: (Dinas Pendistribusian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe).

Berdasarkan temuan observasi lapangan, penulis menemukan bahwa pelaku UMKM belum seluruhnya memanfaatkan pemasaran online dan masih rendah dalam penggunaan teknologi. Hal ini tentu saja didasari oleh kurang optimalnya

sistem peran pendukung yang terdiri dari lembaga pembiayaan, pengembangan, pemasaran dan lembaga konsultasi yang belum ditekankan pada pengembangan UMKM khususnya pada usaha kuliner di Kota Lhokseumawe. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dapat menimbulkan dampak negatif seperti kehilangan peluang untuk berkembang di era digital, tersingkirkan dalam sistem bisnis, kesulitan memperluas pasar, dan rentan terhadap persaingan yang ketat. Tanpa teknologi juga banyak UMKM yang masih mengandalkan proses manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan biaya operasional. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, diharapkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak swasta perlu bersinergi yang mana nantinya UMKM dapat menerapkan teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah atau pihak yang terkait lainnya sehingga pelaku UMKM memiliki pengetahuan dalam menggunakan teknologi. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih untuk mengangkat judul mengenai **“Collaborative Governance dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kuliner Berbasis Digital di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe, difokuskan pada elemen proses kolaborasi yaitu: dialog tatap muka (*face to face dialog*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*share understanding*) dan hasil sementara (*intermediate outcome*).
2. Kendala *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan juga fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala *Collaborative Governance* dalam mengembangkan UMKM Kuliner berbasis digital di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam membangun ide-ide dan masukkan untuk memperkaya kepustakaan. Serta juga dapat berguna

sebagai bahan tambahan dan kontribusi untuk memperluas pengetahuan ilmu sosial, terutama ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berpartisipasi didalam suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diharapkan bahwa temuan pada penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya yang mempelajari subjek yang sama.